



DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT

RENCANA KERJA 2021

Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai Manokeari
Website : <https://dinkes.papuabaratprov.go.id>
Email : dinaskesehatanprovpuuabarat@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Provinsi Barat Tahun 2021 dapat diselesaikan. RENJA Dinas Kesehatan Papua Barat tahun 2021 merupakan acuan penyelenggaraan program dan kegiatan bagi seluruh ASN di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Papua Barat menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya RENJA Dinas Kesehatan Provinsi Papua barat tahun 2021 ini, disampaikan terima kasih.

Manokwari, Februari 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI PAPUA BARAT



OTTO PANORRONGAN, SKM., M.MKes
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19671004 199312 1 003



RENJA TAHUN 2021

**OTTO PARORRONGAN, SKM., M.MKes.
KEPALA DINAS KESEHATAN**

VISI DAN MISI

VISI :

Menjadi Institusi terdepan dalam :
" Mewujudkan Papua Barat yang Sehat,
Berkualitas Mandiri dan Berkeadilan"

MISI :

- Menyediakan dukungan kebijakan dan tata Kelola Administrasi yang prima serta memaksimalkan dukungan-dukungan kebijakan system manajemen dan tugas teknis lainnya
- Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau
- Menjamin ketersediaan mutu dan pemerataan Sumber Daya Kesehatan
- Mewujudkan pelayanan Kesehatan yang menuju standar dan terjangkau

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan	1
1.2 Analisa Faktor-Faktor Internal dan Eksternal	3
1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja 2021	4
1.4 Sistem Matika Rencana Kerja 2021	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan	8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2020	15
2.3 Review Terhadap Rangan RKPD	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	28
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah	29
3.3 Penetapan Sasaran Program/Kegiatan Dan Target Kinerja	32
BAB IV PENUTUP	35
Penutup	35

CINTAKU NEGERIKU

DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT



RENJA TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

- ❖ Gambaran Umum Dinas Kesehatan
- ❖ Analisa Faktor-Faktor Internal dan Eksternal
- ❖ Maksud dan Tujuan Rencana Kerja 2021
- ❖ Sistem Matika Rencana Kerja 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT

Pembentukan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat, yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Papua Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat merupakan lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

1. Kewenangan

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Papua Barat dan secara administratif dibina oleh Sekertaris Daerah Provinsi Papua Barat.

2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat terdiri dari :

2.1. Kepala Dinas

2.2. Sekretariat yang terdiri dari :

- 2.2.1. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
- 2.2.2. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset ;
- 2.2.3. Sub Bagian Program, Informasi dan Humas;

2.3. Bidang Pelayanan Kesehatan :

- 2.3.1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- 2.3.2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- 2.3.3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;

2.4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- 2.4.1. Seksi Surveilen dan Imunisasi;
- 2.4.2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- 2.4.3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan NAPZA;

2.5. Bidang Kesehatan Masyarakat

2.5.1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

2.5.2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;

2.5.3. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

2.6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

2.6.1. Seksi Kefarmasian;

2.6.2. Seksi Alat Kesehatan dan PKRT;

2.6.3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

3. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Menurut Golongan Kepegawaian per 31 Desember 2020 adalah sebagaimana tercantum pada tabel. 1 :

Tabel. 1

Jumlah Pegawai Menurut Golongan

URAIAN	MENURUT GOLONGAN DAN JABATAN				KETERANGAN	
	Per 31 Desember 2019	Mutasi		Per 31 Desember 2020		
		Tambah	Kurang			
1	STRUKTURAL	21	-	-	21	
a	Eselon II	1	-	-	1	
b	Eselon III	5	-	-	5	
c	Eselon IV	15	-	-	15	
2	FUNGSIONAL	62	-	-	62	
3	STAF	42	-	-	42	
JUMLAH		163	-	-	163	

Sumber Data : Bagian Kepegawaian Dinkes Provinsi Papua Barat

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Menurut Pendidikan per 31 Desember 2020 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 2 dibawah ini

Tabel. 2
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

URAIAN	MENURUT PENDIDIKAN						JUMLAH
	S2 / Spesialis	S1	D II/ DIII/ DIV	SLTA / SPK	SLTP	SD	
1 PEGAWAI STRUKTURAL							
a Kepala	1						1
b Sekretaris	1						1
c Bidang	1	3					4
d Kase dan Kasubag	1	10	4				15
e Staf	3	51	10	6	-	-	43
SUB JUMLAH	10	64	17	6	0	0	97
2 PEGAWAI FUNGSIONAL							
a Pegawai RSUD Manokwari	2	11	32		-	-	45
b Pegawai Puskesmas				17	-	-	17
SUB JUMLAH	2	11	32	17	0	0	62
JUMLAH	12	75	49	23	0	0	163

Sumber Data : Sub Bagian Hukum, Umum dan Kepegaoian Dinkes Provinsi Papua Barat

1.2 ANALISIS FAKTOR-FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

Dalam pelaksanaan pembangunan selama ini, dan yang akan datang masih menghadapi berbagai permasalahan sebagai akibat dari kelemahan-kelemahan yang membutuhkan tindakan pembenahan dan perbaikan maupun ancaman-ancaman dari luar yang akan dihadapi. Namun demikian dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki apabila dikelola dengan baik akan menciptakan peluang untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Dalam situasi dan kondisi yang demikian kompleks, ancaman-ancaman dari luar harus tetap diwaspadai. Faktor-faktor internal yang merupakan kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

1.1. Kekuatan

- a) Posisi geografis yang strategis
- b) Luas wilayah dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah
- c) Memiliki potensi olahraga, seni dan budaya

1.2. Kelemahan

- a) Partisipasi masyarakat Asli Daerah masih rendah.
- b) Terbatasnya prasarana dan sarana kesehatan.
- c) Terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan di bidang kesehatan.
- d) Kapasitas kelembagaan Pemerintah dan Publik masih lemah.
- e) Lemahnya disiplin pegawai.

1. Faktor Eksternal

2.1. Peluang

- a) Kebijakan yang konsisten dari pemerintah untuk meningkatkan SDM terutama untuk Orang Asli Papua.
- b) Desentralisasi wewenang diharapkan memberi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat

2.2. Ancaman

- a) Kurangnya orientasi pada publik dalam pelaksanaan pembangunan
- b) Timbul kerawanan sosial bagi masyarakat di daerah pedalaman terpencil
- c) Timbulnya bahaya penyakit HIV/AIDS akibat sex bebas

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA KERJA 2021

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kerangka pikir kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran, serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan

peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju tatakelola yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Rencana Kerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Rencana Kerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerjasama dengan pejabat dan perencana anggaran daerah. Rencana Kerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil, sehingga hasilnya dapat diukur kinerjanya dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Rencana Kerja ini, dapat dilakukan dengan baik jika ada dukungan dari berbagai pihak, baik secara internal maupun eksternal.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RK-SKPD) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Permendagri ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RK-SKPD) sebagai bagian integral dari siklus penyusunan rencana anggaran yang utuh dan dikerangkakan dalam suatu Sistem Perencanaan Pemerintah Daerah.

Esensi dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (RK-SKPD) bagi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Provinsi Papua Barat. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah diawali dengan penyesuaian terhadap Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang berhasil diperoleh. Pada setiap awal periode pelaksanaan program/kegiatan, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(RK-SKPD) itu dikomunikasikan kepada para *stakeholders* dalam wujud Dokumen Rencana.

Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RK-SKPD) memiliki dua fungsi utama. Pertama, Rencana Kerja merupakan sarana bagi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk menyampaikan program/kegiatan dan indikator yang akan dikerjakan kepada seluruh *stakeholders*

(Gubernur dan masyarakat). Kedua, Rencana Kerja merupakan sarana untuk mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan serta indikator kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama Rencana Kerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2021 mencakup hal-hal berikut ini :

- 1 Aspek Kualitas Rencana Kerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadi Rencana 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat atas berbagai program/kegiatan serta indikator yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Esensi Rencana Kerja yang disusun merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis bisa dicapai pada tahun 2021 sesuai dengan target.
- 2 Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadi Rencana Kerja 2021 sebagai sarana pedoman pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat bagi upaya-upaya perbaikan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk setiap target/sasaran yang belum tercapai pada tahun sebelumnya, manajemen Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga visi, misi dan tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.4 SISTIMATIKA RENCANA KERJA 2021

Dalam Rencana Kerja ini disajikan data kegiatan maupun sumber pendanaan yang bersifat strategis dan indikatif, yaitu data kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam

kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Rencana Kerja individual perkegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output*, dan *outcome*.

Dokumen Rencana Kerja ini mengkonsolidasikan pencapaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat selama tahun 2017 - 2022. Rencana Kerja tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2021, diuraikan dalam bentuk bab-bab sebagai berikut :

- Bab I** Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan.
- Bab II** Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun yang lalu.
- Bab III** Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan..
- Bab IV** Peganggaran dan Rencana Kerja
- Bab V** Penutup

DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT



RENJA TAHUN 2021

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

- ❖ Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan
- ❖ Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2020
- ❖ Review Terhadap Rangan RKPD

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja 2020. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Secara umum Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara kepala Dinas beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik. Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2020 Provinsi Papua Barat seperti yang diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan
Pencapaian Rentra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2020 Provinsi Papua Barat

Kode (Bidang / Program / Kegiatan / Indikator)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Penyelenggara Daerah s/d Tahun Berjalan		
			Target		Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target	Realisasi (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1.02 1	1) Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pengeluaran surat menyurat Dinas	3650 Surat	3650 Surat	3444 Surat	98,41%	3850 Surat	11144	n	
1.02 1	2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan Penggunaan air, listrik, telepon dan faksimile	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	52,36%	12 Bulan	36	n	
1.02 1	7) Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honor yang dibayarkan	114 Orang	114 Orang	100 Orang	76,09%	114 Orang	328	n	
1.02 1	8) Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung kebersihan kantor	22 Orang	22 Orang	19 Orang	84,80%	22 Orang	63	n	
1.02 1	10) Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Komponen ATK yang akan dimanfaatkan semua unit kerja	55 Jenis	55 Jenis	55 Jenis	100%	55 Jenis	165	n	
1.02 1	11) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan	3421 Jenis	3421 Jenis	3421 Jenis	100%	3421 Jenis	10263	n	
1.02 1	12) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pengadaan	60000 Lembar	60000 Lembar	60000 Lembar	100%	60000 Lembar	180000	n	
1.02 1	15) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Perakalan Kantor Yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	24	n	
1.02 1	17) Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	6 Jenis	6 Jenis	3 Jenis	49,14%	6 Jenis	15	n	
1.02 1	18) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Buku	12 Buku	12 Buku	94,31%	12 Buku	36	n	
1.02 1	69) Pemeliharaan data Program dan Kesegawalan	Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	4.422 Orang	4.422 Orang	4020 Orang	99,28%	4.422 Orang	12864	n	
1.02 1	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	151 Kali	151 Kali	235 Kali	78,23%	151 Kali	537	n	
1.02 2	7) Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya struktur OPD sesuai kebutuhan daerah	12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0%	12 Laporan	24	n	
1.02 2	9) Pengadaan peralatan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	0 Bulan	0%	12 Bulan	24	n		
1.02 2	24) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kebutuhan Sarana Prasarana Kantor Terpenuhi	25 Unit	25 Unit	9 Unit	86,08%	25 Unit	59	n	
1.02 2	26) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kebutuhan Sarana Prasarana Kantor Terpenuhi	126 Unit	126 Unit	120 Unit	95,39%	126 Unit	372	n	
1.02 2	28) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	94 Unit	94 Unit	79 Unit	93,26%	94 Unit	267	n	
1.02 2	116) Pembangunan Gedung BAPELKES	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	126 Unit	126 Unit	126 Unit	100%	126 Unit	378	n	
1.02 2	117) Rehabilitasi Gudang Medical Boat	kebutuhan Sarana Prasarana Kantor Terpenuhi	50 Unit	50 Unit	0 Unit	0%	50 Unit	50	n	
1.02 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Pembangunan Gedung BAPELKES	1 Paket	1 Paket	1 Paket	98%	1 Paket	3	n	
1.02 3	1) Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya Rehabilitasi Gudang Medical Boat	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3	n	
1.02 3	2) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terperuhnya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	390 Stel	390 Stel	386 Stel	99%	390 Stel	1166	n	
1.02 3	4) Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	195 Stel	195 Stel	105 Stel	98,95%	195 Stel	495	n	
1.02 3	5) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersediaanya Pakaian Khusus hari-hari tertentu	1 Paket	1 Paket	1 Paket	99,76%	1 Paket	3	n	
1.02 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
1.02 5	1) Pendidikan dan pelatihan formal	Terbentuknya Tim Angka Kredit JFT	46 Orang	46 Orang	0 Orang	0%	46 Orang	92	n	
1.02 5	2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Persentase ASN yang disiplin	105 Orang	105 Orang	0 Orang	0%	105 Orang	210	n	
01-02 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
01-02 6	1) Penyusunan RENCANA (Rencana Kerja) OPD	Hasil capaian kinerja dan ikhtisar anggaran	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	n	
01-02 6	11) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Renja dan LKPD yang tepat syarat dan Waktu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	n	
01-02 6	23) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Dokumen RKA dan DPA yang tepat syarat dan Waktu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	n	

Kode (Bidang/Program/Kegiatan/Indikator)	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Program (Revisi Peringkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Revisi Peringkat Daerah) Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Revisi Peringkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat	Target	Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Revisi (%)
					Realisasi (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01:02 6 41	Rapat Kerja Kesehatan Daerah	Terlaksananya Rapat Kerja Kesehatan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	n	
01:02 6 50	Pelaporan Administrasi Kepegawaian SKPD	Laporan SKP PNS dan Laporan Administrasi dan Profil Kepegawaian Lintaspup OPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	n	
01:02 6 56	Penyusunan Laporan Keuangan OPD	Laporan keuangan semester I dan II yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	n	
01:02 6 57	Rapat Koordinasi Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	Terlaksananya koordinasi teknis Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	2	n	
01:02 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan										
01:02 15 1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan Obat dan Vaksin	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3	n	
01:02 15 2	Distribusi Obat, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin serta Logistik Program ke Kabupaten/Kota	Pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan yang terlayani sesuai dengan permintaan/kebutuhan dan atau alokasi pengelola program	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3	n	
01:02 15 5	Pengelolaan/Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	90	n	
01:02 15 7	Distribusi Obat, Vaksin BHPM, dan Bahan Lainnya dari Provinsi ke Kabupaten (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Tersedianya Biaya Pendistribusian obat, BHPM dan Vaksin	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3	n	
01:02 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
01:02 16 12	Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	2	n	
01:02 16 143	Penyediaan Makanan Tambahan BUMIL KEK (DAK Fisik penguatan Intervensi Stunting)	Penyediaan Makanan tambahan bagi ibu hamil KEK di 13 kabupaten/kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0%	13 Kab/Kota	26	n	
01:02 16 144	Penyediaan Makanan Tambahan Balita Kurus (DAK Fisik penguatan Intervensi Stunting)	Jumlah Balita kurus yang menjadi sasaran penerima PMT sebanyak 2700	2.700 Orang	2.700 Orang	2.700 Orang	0 Orang	0%	2.700 Orang	5400	n	
01:02 16 150	Pelacakan dan konfirmasi Masalah Gigi dan Monitoring Evaluasi Kegiatan GZI (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Meningkatnya ketersediaan dan ketjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat	100 %	100 %	100 %	0 %	0%	100 %	100%	n	
01:02 16 151	Orientasi Kohort Ibu dan Bayi Balita (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	81,52 %	81,52%	100 %	100%	n	
01:02 16 153	Penguatan Pembinaan kader (Kesehatan, Guru PAUD/TK/RA tentang Tentang Buku KIA dan Simulasi Deteksi dan Intervensi dini Tumbuh Kembang (SDITK) (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi (DAK)	100 %	100 %	100 %	70,32 %	70,32%	100 %	100%	n	
01:02 16 154	Pertemuan Koordinasi Teknis Persiapan Surveilans Kualitas Air Minum Tk. Provinsi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	100 %	100 %	100 %	0 %	0%	100 %	100%	n	
01:02 16 155	Advokasi Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat (KKS) (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	100 %	100 %	100 %	0 %	0%	100 %	100%	n	
01:02 16 158	Orientasi Higiene Sanitasi Pangan, Penjamah Pangan dan Penanggungjawab Tempat Pengolahan Makanan Tingkat Provinsi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	100 %	100 %	100 %	75,76 %	75,76%	100 %	100%	n	
01:02 16 169	Konvergensi, Koordinasi dan Konsolidasi (P/IS untuk Penurunan Stunting (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Terlaksananya Pembinaan Gigi kepada Masyarakat	100 %	100 %	100 %	79,62 %	78,62%	100 %	100%	n	
01:02 16 172	Koordinasi LS dalam Rangka Mendorong Regulasi/Implementasi GERMAS di Tingkat Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Terlaksananya strategi Promosi Kesehatan dalam mendukung Program Kesehatan	100 %	100 %	100 %	83,92 %	83,92%	100 %	100%	n	
01:02 16 173	Koordinasi dalam rangka Penguatan SPM bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Terlaksananya Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Pelembagaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	0 Layanan	0%	1 Layanan	2	n	

Kode / Bidang / Program / Kegiatan / Indikator	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Program (Rencana Peringkat Daerah Tahun 2021)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020		Target Program dan Kegiatan (Rencana Peringkat Daerah Tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Peringkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
			4	5	6	7	8	9	10	11		
			Target Kinerja dan Capaian Program (Rencana Peringkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2021	Target Program dan Kegiatan (Rencana Peringkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan tahun 2021 I=(P+7+8)				
01:02 16	174 Pendampingan Teknis dalam Rangka Mendorong Regulasi/Implementasi GERMAS di Tingkat Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Layanan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Promosi Kesehatan)	1	1	1	Layanan	1	Layanan	1	3	n	
01:02 16	175 Penguatan dan Penyusunan Program Kerja Daerah Saka Bakti Husada (SBH) di Provinsi Papua Barat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Pelaksanaan Stratkom Promkes dalam Mendukung Program Kesehatan	1	1	1	Dokumen	1	Dokumen	1	3	n	
01:02 16	176 Penyusunan Regulasi terkait Stunting di Provinsi Papua Barat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Tersusunnya Draft Regulasi Dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan atau Stunting di Provinsi	1	1	1	Regulasi	1	Regulasi	1	3	n	
01:02 16	178 Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Suplementasi Gizi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Terlaksananya Pembinaan Gizi kepada Masyarakat	100 %	100 %	100 %	%	100 %	%	100 %	100%	n	
01:02 16	179 Fasilitas Dan Pendampingan Pelaksanaan Surveilans Gizi Kab/Kota Dan Puskesmas (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Sistem Informasi dan Surveilans Pembinaan Gizi Masyarakat	13	13	13	Kab/Kota	13	Kab/Kota	13	39	n	
01:02 16	182 Pelihaan/Orientasi Komunikasi Antar Pribadi bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Terlaksananya Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1	1	1	Layanan	0	Layanan	1	2	n	
01:02 16	183 SURVEILANS dan Karantina Kesehatan (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Kabupaten Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan ke daruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	13	13	13	Kab/Kota	13	Kab/Kota	13	39	n	
01:02 16	185 Rapat Persiapan Pembinaan Oleh Provinsi dalam Pelaksanaan Intervensi PIS PK Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1	1	1	Dokumen	0	Dokumen	1	2	n	
01:02 16	187 Bimtek Pendampingan Teknis dalam Rangka Mendorong Pelaksanaan PIS PK di Tingkat Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Pembinaan Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	13	13	13	Kab/Kota	0	Kab/Kota	13	26	n	
01:02 16	188 Bantuan Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua Barat	Bantuan Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua Barat	1	1	1	Kegiatan	0	Kegiatan	1	2	n	
01:02 16	189 Hibah Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Papua Barat	Hibah Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Papua Barat	1	1	1	Kegiatan	0	Kegiatan	1	2	n	
01:02 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas pembantu dan laboratorinya		1	1	1	Dokumen	0	Dokumen	1	2	n	
01:02 25	24 Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Akreditasi Puskesmas	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	0	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	n	
01:02 25	25 Evaluasi Deta ASPAK Kabupaten/Kota		2	2	2	Fasyankes	0	Fasyankes	2	2	n	
01:02 25	26 Rehabilitas dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan	1	1	1	Dokumen	0	Dokumen	1	2	n	
01:02 55	Program Imunisasi		1	1	1	Laporan	0	Laporan	1	1	n	
01:02 55	1 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi	Jumlah dinas kesehatan yang menyajikan dan mengevaluasi hasil kegiatan imunisasi	1	1	1	Laporan	0	Laporan	1	1	n	
01:02 55	2 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Komda KPI	Jumlah kab/kota yang menyajikan dan mengevaluasi hasil kegiatan KPI	1	1	1	Laporan	0	Laporan	1	1	n	
01:02 64	Program Peningkatan Jumlah Rumah Sakit PK5 Jamkesmas		764.228	764.228	764.228	Jiwa	0	Jiwa	764.228	764.228	n	
01:02 64	7 Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah Penerima Bantuan (PBI) Dalam Rangka Keberlangsungan UHC	764.228	764.228	764.228	Jiwa	0	Jiwa	764.228	764.228	n	
01:02 80	Program Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer											

Kode (Bidang / Program / Kegiatan / Indikator)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Program (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Meluaran Kegiatan s.d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Pencapaian Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan		
					Target	Realisasi	Tingkat	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi (%)	(0-100%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.02.80	2 Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Tradisional	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1	n
01.02.84	5 Bantuan Beasiswa Tenaga Kesehatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan berkelanjutan	25 Orang	25 Orang	1 Orang	1 Orang	100%	25 Orang	26	n
01.02.85	4) Pembangunan Rumah Sakit		7 Orang	7 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	7 Orang	7	n
01.02.85	4) Pembangunan Rumah Sakit	Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit Provinsi Secara Bertahap	1 Paket.	1 Paket.	1 Paket.	1 Paket.	100%	1 Paket.	2	n
01.02.85	6) Penguasaan Alat Kesehatan / Kedokteran / Laboratorium Rumah Sakit	Tersedianya Alat Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium Rumah Sakit	1 Paket.	1 Paket.	1 Paket.	1 Paket.	100%	1 Paket.	2	n
01.02.85	12) Operasional RSUD Provinsi	Terselenggaranya Pelayanan RSUD Provinsi	1 Paket.	1 Paket.	0 Paket.	0 Paket.	0%	1 Paket.	1	n
01.02.86	4) Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	n
01.02.86	6) Tim Penanggulangan Situasi KLB Kesehatan	Jumlah Tim Penanggulangan Situasi KLB Kesehatan	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	100%	26 Orang	78	n
01.02.86	8) Penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui surveilans epidemiologi	Jumlah kasus dan identifikasi faktor risiko yang diselidiki	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	n
01.02.86	9) Penatalaksanaan penderita	Jumlah Penatalaksanaan Penderita yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi KLB	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	n
01.02.86	10) Pencegahan dan pengendalian	Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	n
01.02.86	13) Komunikasi Risiko	Tersedianya Informasi yang tersedia pada Situasi KLB	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	n

a. Realisasi Program/ kegiatan Tahun 2020 yang tidak memenuhi Target/ Capaian

Realisasi Program/ Kegiatan Dinas Kesehatan Papua Barat yang tidak mencapai target diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n)		Realisasi Capaian Kinerja		Realisasi Capaian (%)	Permasalahan/ Kendala
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
				K	K				
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							Permasalahan/ Kendala
		57 Tersedianya perencanaan Dak Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2021	Terciptanya perencanaan Dak Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2021	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	Situasi Pandemi Covid-19
2	Meningkatnya Ketersedian Obat dan Perbekalan Kesehatan	15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan							Permasalahan/ Kendala
		6 Tersedianya Prasarana Farmasi	Terpenuhinya Prasarana Farmasi	100	Persen	0	Persen	0%	Waktu/ Agenda Pelaksanaan Kegiatan
		7 Terdistribusinya Obat, Vaksin BHMP dan Bahan Lainnya	Terdistribusinya Obat, Vaksin BHMP dan Bahan Lainnya	100	Persen	0	Persen	0%	Waktu/ Agenda Pelaksanaan Kegiatan
3	Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat	16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat							Permasalahan/ Kendala
		12 Pertemuan Peningkatan Kapasitas Perawat Tentang Penanggulangan Penderita Gawat Darurat di Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Perawat Tentang Penanggulangan Penderita Gawat Darurat di Provinsi Papua Barat	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	Situasi Pandemi Covid-19
		143 Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil KEK 13 Kabupaten/Kota	Tersedianya Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil KEK 13 Kabupaten/Kota	13	Kab/ Kota	0	Kab/ Kota	0%	Situasi Pandemi Covid-19
		144 Menurunnya Jumlah Balita Kurus	Presentase Menurunnya Jumlah Balita Kurus	2.700	Orang	0	Orang	0%	Situasi Pandemi Covid-19
		145 Presentasi Yang Mendapatkan Pembinaan Gizi	Terlaksananya Pembinaan Gizi Untuk Masyarakat Khususnya Bayi dan Ibu Hamil	100	Persen	0	Persen	0%	Situasi Pandemi Covid-19
		146 Presentase Pelayanan Kesehatan Yang Bernutu Bagi Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Bagi Masyarakat	100	Persen	0	Persen		Situasi Pandemi Covid-19
		150 Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Yang Mutu Bagi Seluruh Masyarakat	Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Yang Mutu Bagi Seluruh Masyarakat	100	Persen	0	Persen	0%	Situasi Pandemi Covid-19

	151	Persentase Peralinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peralinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Semakin Meningkat	100	Persen	0	Persen	0%	Situasi Pandemi Covid-19
	154	Meningkatnya Pengawasan Lingkungan Yang Berkualitas	Meningkatnya Pengawasan Lingkungan Yang Berkualitas	1	Laporan	0	Laporan	0%	Situasi Pandemi Covid-19
	155	Meningkatnya Penyeatan dan Pengawasan Lingkungan Yang Berkualitas	Meningkatnya Penyeatan dan Pengawasan Lingkungan Yang Berkualitas	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	Situasi Pandemi Covid-19
	162	Jumlah Jemaah Haji Yang Telah DI Periksa Kebugaran dan Kesehatannya	Jumlah Jemaah Haji Yang Telah DI Periksa Kebugaran dan Kesehatannya	100	Orang	0	Orang	0%	Situasi Pandemi Covid-19
	173	Pembinaan Kabupaten Kota Dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Berhasil Dibina	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	Situasi Pandemi Covid-19
	177	Meningkatnya Persentase Pemahaman Peserta Terkait Percepatan Capaian SPM PTM	Mendapatkan Pemahaman Yang Sama Tentang Standar Pelayanan Standar Penyakit Tidak Menular (Hypertensi, Diabhetes, ODGJ, DDRF PTM Usia Produktif	1	Dokumen	0	Dokumen	0%	Situasi Pandemi Covid-19

b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan selain kendala waktu dan Agenda Pelaksanaan Program/ Kegiatan juga disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia terlebih khusus di Papua Barat, sehingga target kinerja tidak dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini tentunya harus melihat kondisi Pandemi Covid-19 yang masih terus melanda di seluruh wilayah Peovinsi Papua Barat.

c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, implikasi yang timbul adalah adanya penurunan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/ kegiatan apabila target tidak tercapai dan peningkatan kasus/masalah kesehatan di masyarakat. Namun tidak semua indikator yang belum tercapai secara langsung berdampak pada peningkatan kasus/masalah kesehatan di masyarakat.

d. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, yaitu :

1. Melihat kondisi Pandemi Covid-19 yang sedang melanda masyarakat di Provinsi Papua Barat, dengan melakukan koordinasi melalui virtual.
2. Komitmen bersama mulai dari Kepala Dinas, pemegang program sampai dengan staf
3. Kerjasama yang baik antara lintas program dan lintas sektor
4. Pembinaan secara kontinyu kepada pemegang program yang ada di Kabupaten/Kota
5. Pembinaan terhadap kader-kader kesehatan yang ada di wilayah
6. Pertemuan monitoring evaluasi program rutin terhadap kemajuan, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program di lapangan.
7. Berusaha membuat terobosan/inovasi terhadap pelaksanaan program

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2020.

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya, disamping tanggung jawab individu dan keluarga.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Barat sampai pada tahun 2020 belum berjalan dengan Optimal. Hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator yang menunjukkan ketidakberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan itu sendiri. Tidak tercapainya beberapa target pada indikator Kinerja yang ditetapkan memang menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan kesehatan.

Namun berbagai capaian yang diperoleh, tentunya bukan suatu hal yang membuat Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tidak mengoreksi kinerjanya tetapi harus tetap terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan berbagai fasilitas dan sumber daya manusia kesehatan yang ada.

Dengan memperhatikan faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3. Sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Papua Barat.

Dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut adalah Tabel Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2020.

**Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat**

No	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Kesehatan			Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Persentase Kab/Kota yang Memiliki Profil Kesehatan Setiap Tahunnya	%	31%	46%	46%	53,85	53,85	53,85				
2	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka	43	<10	<10	9	9	9				
3	Angka kelangsungan hidup bayi per 1.000 kelahiran	Angka	957			-	-	-				Tidak diketahui definisi operasional (Untuk indikator ini tidak terdapat dalam indikator bidang kesehatan RPJMD Papua Barat periode 2017-2022)
4	Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	Angka	22			14	14	192				
5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka	<50	<50	<50	40	189	194				
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak di Usia Pendidikan Dasar Kabupaten/kota	%	100.00	100.00	100.00	-	-	-				Tidak diperoleh data dari pengelola program jumlah peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 10
7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100.00	100.00	100.00	-	-	-				Tidak diperoleh data dari Pengelola Program tentang jumlah Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Produktif di Kabupaten/kota	%	100.00	100.00	100.00	-	-	-				Tidak diperoleh data dari Pengelola Program terkait pelayanan kesehatan usia produktif.
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut Kabupaten/kota	%	100.00	100.00	100.00	15,10	15,10	15,10				
10	Persentase Kab/kota yang melaksanakan Keluarga Sehat	%	25.00	30%	30%	-	-	-				Indikator yang dinilai adalah jumlah Kabupaten yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
11	Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat	Kabupaten	13			-	-	-				Indikator ini masih bersifat global karena untuk memenuhi indikator kabupaten sehat harus terpenuhi 9 indikator diantaranya : 1. Tatanan pemukiman sarana dan prasarana sehat; 2. Tatanan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi sehat; 3. Tatanan industri dan perkantoran sehat; 4. Tatanan kawasan parawisata sehat; 5. Tatanan pertambangan sehat; 6. Tatanan hutan sehat; 7. Tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri; 8. Tatanan ketahanan pangan dan gizi; 9. Tatanan kehidupan sosial yang sehat. Sehingga dapat dipastikan tidak dapat tercapainya indikator tersebut. (Sebaiknya digantikan Kabupaten/kotayang memiliki Prilaku Hidup Bersih dan Sehat).
12	Persentase Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Hidup Sehat	%	100.00			-	-	-				Indikator yang dinilai adalah Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

28	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Bidan Desa Yang ditempatkan	Orang	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	Program Papua Barat Sehat baru dilaksanakan tahun 2019
29	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Bidan Desa Yang ditempatkan	Orang	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	Program Papua Barat Sehat baru dilaksanakan tahun 2019
30	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	%	70.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	-	-	-	-	-	Pada indikator ini tidak diperoleh data dari Pengelola Program.
31	Menurunnya prevalensi HIV pada penduduk usia 15-49 menjadi <1,5% pada tahun 2022	%	1.90	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	
32	Pencapaian UCI desa	%	64.74	73.83	73.83	73.83	73.83	73.83	73.83	73.83	73.83	73.83	73.83	73.83	73.83	73.83	73.83	73.83	73.83	80,43	80,43	80,43	80,43	80,43	
33	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Malaria	%	65.04	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	95,05	95,05	95,05	95,05	95,05	Pada tahun 2017 tidak diperoleh data, indikator yang dinilai terkait malaria adalah tentang angka kesakitan malaria (per 1.000 penduduk)
34	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	Indikator yang dinilai terkait DBD adalah angka kesakitan DBD (per 100.000 penduduk)
35	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	87.94	90.51%	90.51%	90.51%	90.51%	90.51%	90.51%	90.51%	90.51%	90.51%	90.51%	90.51%	90.51%	90.51%	90.51%	90.51%	90.51%	-	-	-	-	-	Indikator yang dinilai terhadap TBC adalah Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC
36	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Terdampak Krisis Kesehatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	Indikator yang dinilai terhadap Persentase Pelayanan Kesehatan terhadap penduduk yang terdampak krisis kesehatan adalah persentase KLB ditangani < 24 jam.
37	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kabupaten/kota	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	
38	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita DM di Kabupaten/kota	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pada tahun 2017 tidak diperoleh data dari Pengelola Program
39	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten/kota	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	Tidak diperoleh data dari Pengelola Program
40	Jumlah kabupaten dengan eliminasi kusta	kabupaten	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	Provinsi Papua Barat belum masuk tahapan eliminasi kusta. Indikator yang dinilai terhadap kusta adalah angka penemuan kasus baru kusta (per 100.000 penduduk)	
41	Persentase Jumlah Orang Yang Minum Obat Filariasis	%	85.00	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	85,21	85,21	85,21	85,21	85,21		
42	Persentase Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Pandu PTM	%	85.00	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	31,03	31,03	31,03	31,03	31,03	
43	Cakupan Pelayanan Kesehatan ISPA Kabupaten/kota	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	Tidak diperoleh data dari Pengelola Program.
44	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Frambusia	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	Tidak diperoleh data dari Pengelola Program. Indikator yang dinilai adalah cakupan pelayanan kesehatan penderita Frambusia.

45	Cakupan Penanggulangan Diare	%	100.00	100.00	100.00	39,33	39,33	39,33					
46	Kabupaten/kota dengan minimal 1 fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan dan mengembangkan yankes indera sesuai standar	Kabupaten	3	5	5	-	-	-					Tidak diperoleh data dari Pengelola Program
47	Cakupan Korbinwas Kinerja Pengelolaan Dana Otsus Bidang Kesehatan												Tidak terdapat indikator pada RENSTRA Dinas Kesehatan Papua Barat 2017-2022
48	Angka Kematian Ibu OAP	Absolute	<50	<50	<50	40	40	40					Belum dapat dipilah untuk Orang Asli Papua
49	Angka Harapan Hidup OAP	Absolute	64			65,55	65,55	65,55					Belum dapat dipilah untuk Orang Asli Papua (Angka dimasukkan adalah Angka Kematian Orang Asli Papua keseluruhan)
50	Bumil OAP Dapat Asupan Makanan Tambahan	%	79,35			-	-	-					Belum dapat dipilah untuk Orang Asli Papua
51	Balita OAP dapat Asupan makan Tambahan		79,35			-	-	-					Belum dapat dipilah untuk Orang Asli Papua
52	Cakupan Penempatan Apoteker OAP di Fasilitas Kesehatan	%	65			-	-	-					Belum dapat dipilah untuk Orang Asli Papua
53	Angka Kematian Bayi OAP	Absolute	24			150	150	150					Belum dapat dipilah untuk Orang Asli Papua (Angka dimasukkan adalah Angka Kematian Bayi keseluruhan)
54	Jumlah Kasus Baru HIV Positif	Kasus	80			380	380	380					
55	Penempatan Apoteker OAP di Fasilitas Kesehatan	Orang	150			112	112	112					Belum dapat dipilah untuk Orang Asli Papua (Angka ini data seluruh Apoteker di Papua Barat)
56	Jumlah RSUD Kelas C yang Terakreditasi	Unit	4			6	6	6					
57	RSUD Rujukan provinsi	Unit	0			1	1	1					
58	Dokter Spesialis dari OAP		6			109	109	109					Belum dapat dipilah untuk Orang Asli Papua (Angka ini data seluruh dokter spesialis di Provinsi Papua Barat)
59	Persentase Pasien Masyarakat OAP Sakit Berat di Rujuk dari seluruh yang memenuhi persyaratan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					Sudah menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota pada Tahun Anggaran 2019 (Untuk dihilangkan dalam indikator bidang kesehatan RPJMD Papua Barat periode 2017-2022)

2.3 Review Terhadap Rancangan RKPD

Dalam melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 dilakukan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan target Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan juga tingkat kinerja Dinas Kesehatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat berupa rancangan awal RKPD.

Review ini sangat diperlukan dimana untuk mendapatkan formulasi program dan kegiatan yang tepat berdasarkan perbandingan antara kebijakan Pemerintah Daerah dan kebutuhan terhadap program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan di masyarakat.

Selanjutnya perlu disadari bahwa paradigma baru pengelolaan keuangan negara menuntut upaya perubahan yang mendasar dalam pendekatan penganggaran. Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Dan sangat penting juga untuk memastikan bahwa pilihan program sebagai instrumen kebijakan benar-benar merupakan alternatif terbaik yang mencakup kegiatan-kegiatan yang mencerminkan alternatif pendekatan paling efisien untuk menghasilkan keluaran dan efektif dalam mendukung pencapaian rencana program. Dengan demikian antara kebijakan, program/kegiatan dan sub kegiatan harus merupakan sebuah rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual.

Berikut tabel atas reuiu RKPD TA 2021 yang diuraikan dibawah ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2020 Provinsi Papua Barat

Kode	Rancangan Awal RKPD				Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
					37.836.109.413					37.836.109.413	
1.02.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Manokwari	Jumlah pengalihan surat menyurat Dinas	3850 Surat	20.994.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KAB. MANOKWARI	Jumlah pengalihan surat menyurat Dinas	3850 Surat	20.994.000	
1.02.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Papua Barat	Jumlah bulan penggunaan air, listrik, telepon dan faksimile	12 Bulan	4.292.393.180	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Papua Barat	Jumlah bulan penggunaan air, listrik, telepon dan faksimile	12 Bulan	4.292.393.180	
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Manokwari	Jumlah Honor yang terbarkan	114 Orang	2.247.109.440	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KAB. MANOKWARI	Jumlah Honor yang terbarkan	114 Orang	2.247.109.440	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Manokwari	Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung Kebersihan Kantor	22 Orang	449.921.557	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB. MANOKWARI	Jumlah tenaga kebersihan dan Fasilitas Pendukung Kebersihan Kantor	22 Orang	449.921.557	
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Manokwari	Jumlah Komponen ATK yang akan dimanfaatkan semua unit kerja	55 Jenis	381.899.834	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KAB. MANOKWARI	Jumlah Komponen ATK yang akan dimanfaatkan semua unit kerja	55 Jenis	381.899.834	
1.02.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Manokwari	Jumlah barang cetakan	3421 Jenis	255.443.089	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KAB. MANOKWARI	Jumlah barang cetakan	3421 Jenis	255.443.089	
1.02.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Manokwari	Jumlah Peralatan Kantor Yang Disediakan	60.000 Lembar	374.340.050	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KAB. MANOKWARI	Jumlah Peralatan Kantor Yang Disediakan	60.000 Lembar	374.340.050	
1.02.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Manokwari	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Buku	180.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KAB. MANOKWARI	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Buku	180.000.000	
1.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Manokwari	Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	4.422 Orang	260.080.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	KAB. MANOKWARI	Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	4.422 Orang	260.080.000	
1.02.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Papua Barat, Papua Barat	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	151 Kali	3.530.566.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Papua Barat, Papua Barat	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	151 Kali	3.530.566.000	
1.02.01.01.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Papua Barat	Tersedianya struktur OPD sesuai kebutuhan daerah	12 Laporan	183.120.243	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Papua Barat	Tersedianya struktur OPD sesuai kebutuhan daerah	12 Laporan	183.120.243	
1.02.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Manokwari	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Bagi ASN	12 Bulan	25.660.242.020	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB. MANOKWARI	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Bagi ASN	12 Bulan	25.660.242.020	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
					2.513.037.569					2.513.037.569	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Manokwari	kebutuhan Sarana Prasarana Kantor Terpenuhi	25 Unit	76.738.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Manokwari	kebutuhan Sarana Prasarana Kantor Terpenuhi	25 Unit	76.738.200	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Manokwari	kebutuhan Sarana Prasarana Kantor Terpenuhi	126 Unit	387.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Manokwari	kebutuhan Sarana Prasarana Kantor Terpenuhi	126 Unit	387.000.000	
1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Manokwari	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	94 Unit	1.470.425.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Manokwari	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	94 Unit	1.470.425.000	
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Manokwari	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	126 Unit	250.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Manokwari	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	126 Unit	250.000.000	
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Manokwari	kebutuhan Sarana Prasarana Kantor Terpenuhi	50 Unit	72.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Manokwari	kebutuhan Sarana Prasarana Kantor Terpenuhi	50 Unit	72.000.000	
1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Manokwari	Terlaksananya Pembangunan Gedung BAPELKES	1 Paket	0	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Manokwari	Terlaksananya Pembangunan Gedung BAPELKES	1 Paket	0	

Rancangan Awal RKPD							Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021						
Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	Catatan Penting		
1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab.Manokwari	Teraksananya Rehabilitasi Gudang Medical Boat	1 Paket.	256.874.369	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab.Manokwari	Teraksananya Rehabilitasi Gudang Medical Boat	1 Paket.	256.874.369			
Program Peningkatan Disiplin Aparatur													
1.02.01.1.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Papua Barat	Terperuhnya Pakelan Dinas beserta perlengkapannya	390 Stelli	189.520.100	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Papua Barat	Terperuhnya Pakelan Dinas beserta perlengkapannya	390 Stelli	189.520.100			
1.02.01.1.05.02	Pengadaan pakaian KORPRI	Papua Barat	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	195 Stelli	151.557.945	Pengadaan pakaian KORPRI	Papua Barat	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	195 Stelli	151.557.945			
1.02.01.1.05.02	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Papua Barat	Tersediannya Pakaian Khusus hari hari tertentu	1 Paket.	447.781.800	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Papua Barat	Tersediannya Pakaian Khusus hari hari tertentu	1 Paket.	447.781.800			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab.Manokwari	Terbentuknya Tim Angka Kredit JFT	45 Orang	209.618.961	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab.Manokwari	Terbentuknya Tim Angka Kredit JFT	45 Orang	209.618.961			
1.02.01.1.05.10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab.Manokwari	Meningkatnya Persentase ASN yang disiplin	105 Orang	113.374.527	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab.Manokwari	Meningkatnya Persentase ASN yang disiplin	105 Orang	113.374.527			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan													
1.02.01.1.01.06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab.Manokwari	Hasil capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD Per Tahun Anggaran	1 Laporan	28.218.698	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab.Manokwari	Hasil capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD Per Tahun Anggaran	1 Laporan	28.218.698			
1.02.01.1.01.01	Penyusunan RENCANA (Rencana Kerja) OPD	Kab.Manokwari	Dokumen Renja dan LKPD yang tepat, syarat dan Waktu	1 Laporan	36.354.843	Penyusunan RENCANA (Rencana Kerja) OPD	Kab.Manokwari	Dokumen Renja dan LKPD yang tepat, syarat dan Waktu	1 Laporan	36.354.843			
1.02.01.1.01.02	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Kab.Manokwari	Dokumen RKA dan DPA yang tepat, syarat dan Waktu	1 Laporan	44.536.699	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Kab.Manokwari	Dokumen RKA dan DPA yang tepat, syarat dan Waktu	1 Laporan	44.536.699			
1.02.01.1.06.09	Rapat Kerja Kesehatan Daerah	Kab.Manokwari	Teraksananya Rapat Kerja Kesehatan Daerah	1 Laporan	1.665.199.788	Rapat Kerja Kesehatan Daerah	Kab.Manokwari	Teraksananya Rapat Kerja Kesehatan Daerah	1 Laporan	1.665.199.788			
1.02.01.1.05.03	Pelaporan Administrasi Kepegawaian SKPD	Papua Barat	Laporan SKP PNS dan Laporan Administrasi dan Profil Kepegawaian Lingkup OPD	1 Laporan	19.081.416	Pelaporan Administrasi Kepegawaian SKPD	Papua Barat	Laporan SKP PNS dan Laporan Administrasi dan Profil Kepegawaian Lingkup OPD	1 Laporan	19.081.416			
1.02.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan OPD	Kab.Manokwari	Laporan keuangan semester I dan II yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	1 Laporan	23.949.985	Penyusunan Laporan Keuangan OPD	Kab.Manokwari	Laporan keuangan semester I dan II yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	1 Laporan	23.949.985			
1.02.01.1.06.09	Rapat Koordinasi Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	Kab.Manokwari	Teraksananya koordinasi teknis Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan	1 Laporan	0	Rapat Koordinasi Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	Kab.Manokwari	Teraksananya koordinasi teknis Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan	1 Laporan	0			
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan													
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kab.Manokwari	Ketersediaan Obat dan Vaksin	1 Paket.	1.500.000.000	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kab.Manokwari	Ketersediaan Obat dan Vaksin	1 Paket.	1.500.000.000			
1.02.02.1.01.21	Distribusi Obat, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin serta Logistik Program ke Kabupaten/Kota	Papua Barat	Pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan yang terlayani sesuai dengan permintaan/kebutuhan dan atau alokasi pengelola program	1 Paket.	1.360.000.000	Distribusi Obat, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin serta Logistik Program ke Kabupaten/Kota	Papua Barat	Pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan yang terlayani sesuai dengan permintaan/kebutuhan dan atau alokasi pengelola program	1 Paket.	1.360.000.000			
1.02.04.1.01.01	Pengelolaan Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT	Papua Barat	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	30 Orang	222.309.143	Pengelolaan Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT	Papua Barat	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	30 Orang	222.309.143			
1.02.02.1.01.21	Distribusi Obat, Vaksin BHMHP, dan Bahan Lainnya dari Provinsi ke Kabupaten (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Tersediannya Biaya Pendistribusian obat, BHMHP dan Vaksin	1 Paket.	650.646.200	Distribusi Obat, Vaksin BHMHP, dan Bahan Lainnya dari Provinsi ke Kabupaten (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Tersediannya Biaya Pendistribusian obat, BHMHP dan Vaksin	1 Paket.	650.646.200			
Program Upaya Kesehatan Masyarakat													
1.02.05.1.03.01	Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat	Papua Barat	Teraksananya Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat	1 Dokumen	942.399.999	Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat	Papua Barat	Teraksananya Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat	1 Dokumen	942.399.999			
1.02.02.1.01.22	Penyediaan Makanan Tambahan BUMIL KEK (DAK Fisik penguatan Intervensi Stunting)	Papua Barat	Penyediaan Makanan tambahan bagi ibu hamil KEK di 13 Kabupaten/ Kota	13 Kab/Kota	2.207.588.000	Penyediaan Makanan Tambahan BUMIL KEK (DAK Fisik penguatan Intervensi Stunting)	Papua Barat	Penyediaan Makanan tambahan bagi ibu hamil KEK di 13 Kabupaten/ Kota	13 Kab/Kota	2.207.588.000			

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021											
Rancangan Awal RKPD					Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021						
Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1.02.02.1.01.22	Penyediaan Makanan Tambahan Balita Kurus (DAK Fisik Penguatan Intervensi Stunting)	Papua Barat	Jumlah Balita kurus yang menjadi sasaran penerima PMT sebanyak 2.700 Balita	2.700 Orang	2.589.658.000	Penyediaan Makanan Tambahan Balita Kurus (DAK Fisik Penguatan Intervensi Stunting)	Papua Barat	Jumlah Balita kurus yang menjadi sasaran penerima PMT sebanyak 2.700 Balita	2.700 Orang	2.589.658.000	
1.02.02.1.02.06	Pelacakan dan Konfirmasi Masalah Gizi dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Gizi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat	100%	418.750.510	Pelacakan dan Konfirmasi Masalah Gizi dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Gizi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat	1	418.750.510	
1.02.02.1.02.03	Orientasi Kohort Ibu dan Bayi Balita (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	584.752.877	Orientasi Kohort Ibu dan Bayi Balita (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	584.752.877	
1.02.02.1.02.19	Penguatan Pembinaan Kader Kesehatan, Guru PAUD/TK/RA tentang Tentang Buku KIA dan Simulasi, Deteksi dan Intervensi dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi (DAK)	100%	452.446.426	Penguatan Pembinaan Kader Kesehatan, Guru PAUD/TK/RA tentang Tentang Buku KIA dan Simulasi, Deteksi dan Intervensi dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi (DAK)	1	452.446.426	
1.02.02.1.02.08	Pertemuan Koordinasi Teknis Persiapan Surveilans Kualitas Air Minum Tk. Provinsi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	100%	1.133.978.766	Pertemuan Koordinasi Teknis Persiapan Surveilans Kualitas Air Minum Tk. Provinsi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	1	1.133.978.766	
1.02.05.1.01.01	Advokasi Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat (KKS) (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	100%	216.363.906	Advokasi Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat (KKS) (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	1	216.363.906	
1.02.02.1.02.08	Orientasi Higiene Sanitasi Pangan, Perijamah Pangan dan Penanggungjawab Tempat Pengolahan Makanan Tingkat Provinsi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	100%	190.450.461	Orientasi Higiene Sanitasi Pangan, Perijamah Pangan dan Penanggungjawab Tempat Pengolahan Makanan Tingkat Provinsi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	1	190.450.461	
1.02.05.1.01.01	Konvergensi, Koordinasi dan Konsolidasi LP/LS untuk Penurunan Stunting (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Terlaksananya Pembinaan Gizi kepada Masyarakat	100%	286.245.283	Konvergensi, Koordinasi dan Konsolidasi LP/LS untuk Penurunan Stunting (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Terlaksananya Pembinaan Gizi kepada Masyarakat	1	286.245.283	
1.02.05.1.01.01	Koordinasi LS dalam Rangka Mendorong Regulasi/Implementasi GERMAS di Tingkat Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Terlaksananya strategi Promosi Kesehatan dalam mendukung Program Kesehatan	100%	287.391.836	Koordinasi LS dalam Rangka Mendorong Regulasi/Implementasi GERMAS di Tingkat Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Terlaksananya strategi Promosi Kesehatan dalam mendukung Program Kesehatan	1	287.391.836	
1.02.02.1.02.13	Koordinasi dalam rangka Penguatan SPM bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Terlaksananya Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1 Layanan	268.744.720	Koordinasi dalam rangka Penguatan SPM bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Terlaksananya Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1 Layanan	268.744.720	

Rancangan Awal RKPD										Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021			
Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	Catatan Penting		
1.02.05.1.02.01	Pendampingan Teknis dalam Rangka Mendorong Regulasi/Implementasi GERMAS di Tingkat Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Layanan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Promosi Kesehatan)	1 Layanan	617.400.000	Pendampingan Teknis dalam Rangka Mendorong Regulasi/Implementasi GERMAS di Tingkat Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Layanan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Promosi Kesehatan)	1 Layanan	617.400.000			
1.02.05.1.02.01	Penguatan dan Penyusunan Program Kerja Daerah Saka Bakti Husada (SBH) di Provinsi Papua Barat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Pelaksanaan Stratkom Promkes dalam Mendukung Program Kesehatan	1 Dokumen	148.110.000	Penguatan dan Penyusunan Program Kerja Daerah Saka Bakti Husada (SBH) di Provinsi Papua Barat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Pelaksanaan Stratkom Promkes dalam Mendukung Program Kesehatan	1 Dokumen	148.110.000			
1.02.05.1.02.01	Penyusunan Regulasi terkait Stunting di Provinsi Papua Barat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Tersusunnya Draft Regulasi Dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan atau Stunting di Provinsi	1 Regulasi	245.620.000	Penyusunan Regulasi terkait Stunting di Provinsi Papua Barat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Tersusunnya Draft Regulasi Dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan atau Stunting di Provinsi	1 Regulasi	245.620.000			
1.02.02.1.02.06	Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Suplementasi Gizi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Terlaksananya Pembinaan Gizi kepada Masyarakat	100 Persentase	236.409.309	Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Suplementasi Gizi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Terlaksananya Pembinaan Gizi kepada Masyarakat	100 Persentase	236.409.309			
1.02.02.1.02.06	Fasilitasi Dan Pendampingan Pelaksanaan Surveilans Gizi Kab/Kota (Kas/Kota Dan Puskesmas (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Sistem Informasi dan Surveilans Pembinaan Gizi Masyarakat	13 Kab/Kota	1.069.263.582	Fasilitasi Dan Pendampingan Pelaksanaan Surveilans Gizi Kab/Kota Dan Puskesmas (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Sistem Informasi dan Surveilans Pembinaan Gizi Masyarakat	13 Kab/Kota	1.069.263.582			
1.02.02.1.02.09	Pelatihan/Orientasi Komunikasi Antar Pribadi bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Terlaksananya Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1 Layanan	321.734.500	Pelatihan/Orientasi Komunikasi Antar Pribadi bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Terlaksananya Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1 Layanan	321.734.500			
1.02.02.1.02.17	SURVEILANS dan Karantina Kesehatan (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Kabupaten Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan keaduratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	13 Kab/Kota	571.208.500	SURVEILANS dan Karantina Kesehatan (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Kabupaten Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan keaduratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	13 Kab/Kota	571.208.500			
1.02.02.1.02.27	Rapat Persiapan Pembinaan Oleh Provinsi dalam Pelaksanaan Intervensi PIS PK kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Dokumen	7.212.000	Rapat Persiapan Pembinaan Oleh Provinsi dalam Pelaksanaan Intervensi PIS PK kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Dokumen	7.212.000			
1.02.02.1.02.27	Bimtek Pendampingan Teknis dalam Rangka Mendorong Pelaksanaan PIS PK di Tingkat Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Pembinaan Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	13 Kab/Kota	735.866.000	Bimtek Pendampingan Teknis dalam Rangka Mendorong Pelaksanaan PIS PK di Tingkat Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Papua Barat	Pembinaan Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	13 Kab/Kota	735.866.000			
1.02.02.1.02.19	Bantuan Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua Barat	Papua Barat	Bantuan Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua Barat	1 Kegiatan	4.000.000.000	Bantuan Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua Barat	Papua Barat	Bantuan Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua Barat	1 Kegiatan	4.000.000.000	Kegiatan Baru		
1.02.02.1.02.19	Hibah Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Papua Barat	Papua Barat	Hibah Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Papua Barat	1 Kegiatan	3.000.000.000	Hibah Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Papua Barat	Papua Barat	Hibah Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Papua Barat	1 Kegiatan	3.000.000.000	Kegiatan Baru		

Rancangan Awal RKPD							Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021						
Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	Catatan Penting		
Program pengabdian, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ Puskesmas pembantu dan jaringannya													
1.02.1.02.20	Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Akreditasi Puskesmas	Papua Barat	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Dokumen	258.649.569	Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Akreditasi Puskesmas	Papua Barat	Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	1 Dokumen	258.649.569			
1.02.1.02.20	Evaluasi Data ASPAK Kabupaten/Kota	Papua Barat	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan	2	290.264.289	Evaluasi Data ASPAK Kabupaten/Kota	Papua Barat	0	0	290.264.289			
1.02.1.02.09	Rehabilitas dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Maybrat, Teluk Wondama	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan	2	2.000.000.000	Rehabilitas dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Maybrat, Teluk Wondama	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan	2	2.000.000.000			
Program Imunisasi													
430.842.813													
1.02.1.02.19	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi	Kab. Manokwari	Jumlah dinas kesehatan yang menyajikan dan mengevaluasi hasil kegiatan imunisasi	1 Laporan	215.082.615	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi	Kab. Manokwari	Jumlah dinas kesehatan yang menyajikan dan mengevaluasi hasil kegiatan imunisasi	1 Laporan	215.082.615	Koordinasi Pelaksanaan Imunisasi Covid-19		
1.02.1.02.21	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Komda KIP	Papua Barat	Jumlah kab/kota yang menyajikan dan mengevaluasi hasil kegiatan KIP	1 Laporan	215.760.198	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Komda KIP	Papua Barat	Jumlah kab/kota yang menyajikan dan mengevaluasi hasil kegiatan KIP	1 Laporan	215.760.198			
Program Peningkatan Jumlah Rumah Sakit PKS Jamkesmas													
0													
1.02.1.02.16	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Papua Barat	Jumlah Penerima Bantuan (PBI) Dalam Rangka Keberlangsungan UHC	764.228 Jiwa	0	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Papua Barat	Jumlah Penerima Bantuan (PBI) Dalam Rangka Keberlangsungan UHC	764.228 Jiwa	0			
Program Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer													
258.479.673													
1.02.1.02.10	Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Papua Barat	Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Tradisional	1 Dokumen	258.479.673	Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Papua Barat	Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Tradisional	1 Dokumen	258.479.673			
Program Registrasi dan Akreditasi													
3.727.258.000													
1.02.03.1.02.01	Bantuan Basiswa Tenaga Kesehatan	Papua Barat	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan berkelanjutan	25 Orang	2.774.000.000	Bantuan Basiswa Tenaga Kesehatan	Papua Barat	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan berkelanjutan	25 Orang	2.774.000.000			
1.02.03.1.01.02	Distribusi dan Pemetaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Maybrat	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan berkelanjutan	7 Orang	953.258.000	Distribusi dan Pemetaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Maybrat	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan berkelanjutan	7 Orang	953.258.000			
Program Peningkatan Jumlah Rumah Sakit Rujukan													
16.199.999.528													
1.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit	Kab. Manokwari	Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit Provinsi Secara Bertahap	1 Paket	24.281.256.000	Pembangunan Rumah Sakit	Kab. Manokwari	Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit Provinsi Secara Bertahap	1 Paket	24.281.256.000			
1.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan / Kodokteran / Laboratorium Rumah Sakit	Kab. Manokwari	Tersedianya Alat Kesehatan / Kodokteran / Laboratorium Rumah Sakit	1 Paket	2.760.041.498	Pengadaan Alat Kesehatan / Kodokteran / Laboratorium Rumah Sakit	Kab. Manokwari	Tersedianya Alat Kesehatan / Kodokteran / Laboratorium Rumah Sakit	1 Paket	2.760.041.498			
1.02.1.02.22	Operasional RSUD Provinsi	Papua Barat	Terselenggaranya Pelayanan RSUD Provinsi	1 Paket	119.155.990.773	Operasional RSUD Provinsi	Papua Barat	Terselenggaranya Pelayanan RSUD Provinsi	1 Paket	119.155.990.773			
Program UKM Rujukan													
16.199.999.528													
1.02.1.02.01	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	Papua Barat	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi	1 Laporan	199.999.528	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	Papua Barat	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi	1 Laporan	199.999.528			
1.02.1.02.02	Tim Penanggulangan Situasi KLB Kesehatan	Papua Barat	Jumlah Tim Penanggulangan Situasi KLB Kesehatan	26 Orang	200.000.000	Tim Penanggulangan Situasi KLB Kesehatan	Papua Barat	Jumlah Tim Penanggulangan Situasi KLB Kesehatan	26 Orang	200.000.000			
1.02.1.02.25	Penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan Epidemiologi	Papua Barat	Penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan Epidemiologi	1 Laporan	200.000.000	Penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan Epidemiologi	Papua Barat	Penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan Epidemiologi	1 Laporan	200.000.000			
1.02.1.02.02	Penatalaksanaan penderita yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi KLB	Papua Barat	Jumlah Penatalaksanaan Penderita yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi KLB	1 Laporan	200.000.000	Penatalaksanaan penderita yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi KLB	Papua Barat	Jumlah Penatalaksanaan Penderita yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi KLB	1 Laporan	200.000.000			

Kode	Rancangan Awal RKPD				Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021						
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1.02.02.1.02.26	Pencegahan dan pengebalan	Papua Barat	Terlaksananya Pencegahan dan Pengebalan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB	1 Laporan	15.200.000.000	Pencegahan dan pengebalan	Papua Barat	Terlaksananya Pencegahan dan Pengebalan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB	1 Laporan	15.200.000.000	
1.02.05.1.02.01	Komunikasi Risiko	Papua Barat	Tersedianya Informasi yang tersedia pada Situasi KLB	1 Laporan	200.000.000	Komunikasi Risiko	Papua Barat	Tersedianya Informasi yang tersedia pada Situasi KLB	1 Laporan	200.000.000	

DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT



RENJA TAHUN 2021

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEBIATAN

- ❖ Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- ❖ Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah
- ❖ Penetapan Program/Kegiatan dan Target Kinerja

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional.

RENJA Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mengacu pada RENSTRA Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2017 – 2022, RPJMD Provinsi Papua Barat 2017-2022 dan Renstra Kementerian Kesehatan RI. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mengakomodasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, terutama mengenai pembagian urusan pemerintah bidang kesehatan yang merupakan lampiran dari peraturan Pemerintah tersebut.

Berdasarkan RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat terpilih untuk Periode 2017-2022 yang mengacu pada Visi, Misi dan Nawacita Presiden yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Pembangunan kesehatan Indonesia pada periode 2017-2022 adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran RPJMD 2017-2022 adalah : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- 1) Angka kematian ibu orang asli papua (OAP);
- 2) Angka kematian bayi orang asli papua (OAP);
- 3) Prevalensi HIV/AIDS;
- 4) Rasio tenaga kesehatan, dokter, tenaga medis persatuan penduduk;

- 5) Cakupan puskesmas terakreditasi di distrik; dan
- 6) Jumlah RSUD rujukan Provinsi.

Selain indikator Kinerja diatas merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka untuk pemenuhan amanat tersebut Dinas Kesehatan Papua Barat pada penyusunan RENJA Tahun 2021 akan mengusulkan Program dan Kegiatan baru yang berhubungan dengan amanat dimaksud diatas.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam rentang waktu Tahun 2017-2022. Tujuan dimaksud merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Papua Barat dari masing-masing

Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah provinsi papua barat, maka OPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menetapkan 2 misi prioritas yaitu :

1. Menciptakan tata Kelola Pemerintahan yang baik berbasis Aparatur yang berwibawa serta otonomi khusus yang efektif.

Tujuan pada misi ini adalah Meningkatkan Aksebilitas kinerja dan Profesionalisme Pelayanan OPD Bidang Kesehatan. dengan sasaran yang terdiri dari :

- a. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBD
 - b. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana.
 - c. Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur
 - d. Meningkatnya kualitas system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
2. Misi 2 adalah Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dibidang Pendidikan dan kesehatan.

Tujuan daripada misi ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sasaran-sasaran capaiannya adalah :

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata bermutu dan berkeadilan

Indikator tercapainya tujuan ini pada tahun 2020 adalah :

1. Presentase ketersediaan obat dan vaksin
2. Presentase kabupaten/kota yang minimal 25% fasilitas kesehatan dasarnya dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar berkualitas
3. Cakupan balita gizi buruk (OAP) dapat asupan makanan tambahan
4. Menurunkan angka kematian ibu (OAP) menjadi Kurang dari 50 kelahiran hidup
5. Menurunkan angka kematian bayi (OAP) menjadi Kurang dari 10 per kelahiran hidup
6. Ibu hamil (OAP) dapat asupan makanan tambahan
7. Angka kematian bayi (OAP)

b. Meningkatkan akses dan ketersediaan sarana dan Prasarana kesehatan yang berkualitas dan merata. Meningkatkan akses dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dengan indikator yaitu :

1. Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
2. Jumlah Rumah Sakit Kelas C yang terakreditasi
3. Rumah Sakit Umum Daerah Rujukan Provinsi
4. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

c. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumber daya manusia khususnya OAP

Indikator tercapainya tujuan ini pada tahun 2021 adalah :

1. Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan OAP sesuai standar.
2. Persentase Rumah Sakit memiliki dokter spesialis OAP sesuai standar.
3. Pendidikan Apoteker OAP di fasilitas kesehatan.
4. Penempatan Apoteker OAP di fasilitas kesehatan .
5. Persentase tenaga medis OAP kompetensi khusus.

d. Meningkatkan pengendalian penyakit kritis kesehatan dan bencana.

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit kritis kesehatan, dengan indikator sebagai berikut :

1. Prevalensi Tuberculosis.
2. Annual Paracite Rate Index-API (kasus Malaria).
3. Prevalensi HIV pada populasi orang dewasa
4. Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan
5. Persentase Kampung yang mencapai UCI
6. Angka kesakitan

- e. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumber daya manusia khususnya OAP

Indikator tercapainya tujuan ini pada tahun 2019 adalah :

1. Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan OAP sesuai standar.
2. Persentase Rumah Sakit memiliki dokter spesialis OAP sesuai standar.
3. Pendidikan Apoteker OAP di fasilitas kesehatan.
4. Penempatan Apoteker OAP di fasilitas kesehatan.
5. Persentase tenaga medis OAP kompetensi khusus.

- f. Meningkatkan pengendalian penyakit kritis kesehatan dan bencana.

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit kritis kesehatan, dengan indikator sebagai berikut :

1. Prevalensi Tuberculosis.
2. Annual Paracite Rate Index-API (kasus Malaria).
3. Prevalensi HIV pada populasi orang dewasa.
4. Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan
5. Persentase Kampung yang mencapai UCI.

3.3 Penetapan Sasaran Program/ Kegiatan Dan Target Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022 disusun Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) tiap tahunnya. Rencana Kinerjanya disahkan menjadi DPA oleh DPRD selaku pemegang amanat rakyat. DPA ini pada hakekatnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun pelaksanaan anggaran.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat pada tahun 2021, pada awalnya disusun sebanyak 18 (Delapan

Belas) program. Namun dengan terbitnya PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019, dilakukan beberapa penyesuaian sehingga tidak lagi sesuai dengan RENSTRA 2017-2022 dengan menjadi 5 (Lima) program, yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, (2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Kesehatan, (4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dan (5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi merupakan program yang berfokus pada kegiatan-kegiatan rutin penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari kegiatan administrasi umum, peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur, perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dan kegiatan administrasi keuangan.

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan Program berfokus pada Penyediaan Fasilitas sarana dan Prasarana kesehatan serta Penyediaan Layanan pada UKP Rujukan dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Kesehatan berfokus pada perencanaan dan pengembangan mutu sumber daya manusia kesehatan di provinsi Papua Barat.

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman merupakan program yang berfokus pada Pengendalian dan Pengawasan Pedagang Besar Farmasi (PBF).

Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan berfokus pada Advokasi, Kemitraan serta peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sector dalam penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat.

DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT



RENJA TAHUN 2021

BAB IV PENUTUP

❖ Penutup

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu RENJA juga berfungsi untuk menilik kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. RENJA Dinas Kesehatan Papua barat tahun 2021 ini disusun berdasarkan Rencana Strategisnya tahun 2017-2022 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat tahun 2021. Dengan adanya RENJA Dinas Kesehatan papua Barat tahun 2021, sebagai upaya mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Provinsi Papua barat maupun di Kab./Kota sePapua Barat. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Papua Barat sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam RENJA tahun 2021 ini. Kemudian RENJA Dinas Kesehatan Papua Barat dapat dipedomani dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan realisasi investasi di Provinsi Papua Barat.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RK-OPD) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Semoga Dokumen ini dapat dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang.

Manokwari, Februari 2020

**KEPALA DINAS
KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT**



**OTTO PARORRONGAN, SKM, M.Kes.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19671004 199312 1 003**